

# MATRIKS RENCANA KERJA DJP TA 2019

PAGU ALOKASI TA 2019	
Kode	Uraian
<b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	
<b>1655</b>	<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan serta Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan</b>
<b>SK</b>	<b>Pelayanan Publik yang Prima</b>
<b>501</b>	<b>Kebijakan di Bidang Penyuluhan dan Kehumasan</b>
<b>001</b>	<b>Kebijakan di Bidang Penyuluhan</b>
051	Penyusunan Strategi Penyuluhan dalam Mendukung Edukasi Kesadaran Pajak Masyarakat
052	Penyusunan Materi Edukasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
053	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penyuluhan Perpajakan
054	Inklusi Kesadaran Perpajakan dalam Kurikulum Pendidikan Nasional (PU)
<b>002</b>	<b>Kebijakan di Bidang Pelayanan</b>
051	Penyusunan Kebijakan di Bidang Pelayanan Perpajakan
052	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pelayanan Perpajakan
053	Penyusunan Kebijakan Standardisasi Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
<b>003</b>	<b>Kebijakan di Bidang Kehumasan</b>
051	Penyusunan Kebijakan di Bidang Kehumasan
052	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kehumasan
053	Kampanye Perpajakan
054	Pelaksanaan atas Kebijakan Corporate Brand Identity
055	Implementasi Reformasi Perpajakan
<b>004</b>	<b>Kebijakan di Bidang Kerjasama dan Kemitraan</b>
051	Penyusunan Kebijakan di Bidang Kerjasama dan Kemitraan
052	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kerjasama dan Kemitraan
053	International Partnership
054	Pelaksanaan Penunjang Kegiatan Direktorat P2Humas
<b>1656</b>	<b>Pembinaan, Pemantauan dan Dukungan Teknis di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi Perpajakan</b>
<b>SK</b>	<b>Pelayanan perpajakan yang optimal</b>
<b>501</b>	<b>Layanan Teknologi Informasi Perpajakan</b>
<b>001</b>	<b>Tanpa Sub Output</b>
051	Kegiatan Pemeliharaan Sistem dan Infrastruktur TIK
052	Pelaksanaan dukungan teknis TIK
053	Pelaksanaan Penunjang Kegiatan Direktorat TIP
<b>951</b>	<b>Layanan Internal (Overhead)</b>
<b>001</b>	<b>Tanpa Sub Output</b>
998	Pembangunan/renovasi Gedung dan Bangunan
<b>1657</b>	<b>Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis</b>
<b>SK</b>	<b>Penataan Struktur Organisasi yang Efektif</b>
<b>501</b>	<b>Dokumen Proses Bisnis dan SOP</b>
<b>001</b>	<b>Dokumen Proses Bisnis</b>
051	Penyusunan/Penyempurnaan Proses Bisnis
052	Implementasi Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan, serta Pengembangan Manajemen Transformasi
053	Implementasi Reformasi Perpajakan
054	Joint Program DJP-DJBC (PU)
055	Implementasi Kebijakan Integrasi data Keuangan berbasis Single Identity Number (SIN) (PU)
<b>002</b>	<b>Dokumen SOP</b>
051	Penyusunan/Penyempurnaan SOP
052	Pelaksanaan Penunjang Kegiatan Direktorat TPB
<b>1658</b>	<b>Peningkatan Pelaksanaan Ekstensifikasi Perpajakan</b>
<b>SK</b>	<b>Penerimaan pajak negara yang optimal</b>
<b>501</b>	<b>Kebijakan di Bidang Ekstensifikasi, Pendataan dan Penilaian Perpajakan</b>
<b>001</b>	<b>Kebijakan di Bidang Ekstensifikasi</b>
051	Perumusan/Penyempurnaan Kebijakan Ekstensifikasi
052	Pelaksanaan Internalisasi Kebijakan Ekstensifikasi
053	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Ekstensifikasi

**PAGU ALOKASI TA 2019**

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>
	<b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>
054	Business Development Service (BDS)
055	Pelaksanaan Penunjang Kegiatan Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian
<b>002</b>	<b>Kebijakan di Bidang Pendataan dan Pemetaan</b>
051	Penyempurnaan Kebijakan Terkait pemetaan Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan dan objek PBB P3
052	Penyempurnaan Kebijakan dalam rangka Pendaftaran Wajib Pajak
053	Analisis dan evaluasi data hasil pendaftaran, pemetaan Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan dan objek PBB P3
<b>003</b>	<b>Kebijakan di Bidang Penilaian untuk Tujuan Perpajakan</b>
051	Perencanaan Kebijakan di Bidang Penilaian untuk Tujuan Perpajakan
052	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Penilaian untuk Tujuan Perpajakan
053	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Penilaian
<b>1659</b>	<b>Peningkatan Efektivitas Kegiatan Intelijen Perpajakan</b>
<b>SK</b>	<b>Kegiatan Intelijen yang efektif</b>
<b>501</b>	<b>Dokumen Informasi di bidang Intelijen Perpajakan</b>
<b>001</b>	<b>Dokumen Informasi di Bidang Intelijen Strategik</b>
051	Persiapan Peningkatan Efektifitas Intelijen Strategik
052	Pelaksanaan Peningkatan Intelijen Strategik
053	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Intelijen Strategik
054	Pelaksanaan Penunjang Kegiatan Direktorat Intelijen Perpajakan
<b>002</b>	<b>Dokumen Informasi di Bidang Intelijen Penggalian Potensi</b>
051	Persiapan Peningkatan Efektivitas Intelijen Penggalian Potensi
052	Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Intelijen Penggalian Potensi
053	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Intelijen Penggalian Potensi
<b>003</b>	<b>Dokumen Informasi di bidang Intelijen Penegakan Hukum</b>
051	Persiapan Peningkatan Efektivitas Intelijen Penegakan Hukum
052	Pelaksanaan Peningkatan Efektivitas Intelijen Penegakan Hukum
053	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Intelijen Penegakan Hukum
<b>004</b>	<b>Dokumen Informasi di Bidang Operasi Intelijen</b>
051	Persiapan Peningkatan Efektivitas Operasi Intelijen
052	Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Operasi Intelijen
053	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Operasi Intelijen
<b>501</b>	<b>Laporan Hasil Intelijen Perpajakan (LHIP) Dengan Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan (BUKPER)</b>
051	Persiapan Analisis dan Pengumpulan Bahan
052	Identifikasi, Analisis dan Pengembangan, dan Pengamatan Lapangan
053	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Analisis dan Pengembangan IDLP
<b>1660</b>	<b>Peningkatan Pelayanan di Bidang Penyelesaian Keberatan dan Banding</b>
<b>SK</b>	<b>Peningkatan Efektivitas Keberatan dan Banding</b>
<b>501</b>	<b>Kebijakan di Bidang Keberatan</b>
<b>001</b>	<b>Tanpa Sub Output</b>
051	Perencanaan Kebijakan Teknis Keberatan
052	Penyusunan Kebijakan Teknis Keberatan
<b>502</b>	<b>Dokumen Penyelesaian Banding dan Peninjauan Kembali</b>
<b>001</b>	<b>Tanpa Sub Output</b>
051	Perencanaan Banding dan Peninjauan Kembali
052	Pelaksanaan Sidang Banding Gugatan ke Pengadilan Pajak
053	Pengajuan Peninjauan Kembali Ke Mahkamah Agung
054	Peer Review kegiatan evaluasi atas proses penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan, atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan, atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan
055	Pelaksanaan Penunjang Kegiatan Direktorat Keberatan dan Banding
<b>1661</b>	<b>Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan SDM, dan Pengembangan Organisasi</b>
<b>SK</b>	<b>Organisasi DJP yang fit for purpose</b>
<b>501</b>	<b>Dokumen Peningkatan Kepatuhan dan Investigasi Internal</b>
<b>001</b>	<b>Dokumen Kepatuhan Internal</b>
051	Pelaksanaan Internalisasi Kepatuhan
052	Pelaksanaan Pengujian Kepatuhan Internal dan Pemantauan Pengendalian Intern
053	Penjaminan Kualitas Dan Manajemen Risiko
<b>002</b>	<b>Dokumen Investigasi Internal</b>

**PAGU ALOKASI TA 2019**

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>
	<b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>
051	Pelaksanaan Investigasi Internal
052	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan
<b>502</b>	<b>Layanan Peningkatan Kompetensi dan Pengembangan Kapasitas Pegawai</b>
<b>001</b>	<b>Tanpa Sub Output</b>
051	Assessment Kompetensi Pegawai
052	Pengembangan Kapasitas Pegawai DJP
053	Pelaksanaan Penunjang Kegiatan Direktorat KITSDA
<b>503</b>	<b>Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Organisasi</b>
<b>001</b>	<b>Dokumen Rencana Strategis</b>
051	Monitoring, Evaluasi dan Penyempurnaan Renstra DJP
052	Asistensi Teknis Pihak Donor Pendukung Renstra
<b>002</b>	<b>Dokumen Transformasi Organisasi</b>
051	Perancangan dan Pengembangan Konsep Desain Kelembagaan
052	Evaluasi dan Implementasi Konsep Desain Kelembagaan
<b>003</b>	<b>Dokumen Pengembangan Manajemen Kepegawaian</b>
051	Perancangan dan Pengembangan Sistem Mutasi, Promosi dan Kompensasi
052	Perancangan dan Pengembangan Klasifikasi Jabatan
053	Perancangan dan Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja
<b>1662</b>	<b>Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan, dan Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan</b>
<b>SK</b>	<b>Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan dan Penagihan</b>
<b>501</b>	<b>Kebijakan di Bidang Pemeriksaan Perpajakan</b>
<b>001</b>	<b>Tanpa Sub Output</b>
051	Penyusunan Kebijakan di bidang Perencanaan/Strategi pemeriksaan
052	Penyusunan Kebijakan di bidang Pemeriksaan Transaksi Khusus
053	Penyusunan Kebijakan di bidang Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan
054	Pelaksanaan Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan
055	Penyusunan Kebijakan di bidang Penanganan Transaksi Ekonomi Digital (PU)
<b>502</b>	<b>Kebijakan di Bidang Penagihan Perpajakan</b>
<b>001</b>	<b>Tanpa Sub Output</b>
051	Perencanaan Penyusunan Kebijakan di Bidang Penagihan Pajak
052	Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan di Bidang Penagihan Pajak
053	Internalisasi Kebijakan di Bidang Penagihan Pajak
054	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penagihan Pajak
055	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Penagihan Pajak
056	Pelaksanaan Penunjang Kegiatan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan
<b>1663</b>	<b>Perumusan Kebijakan, Standardisasi dan Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pelaksanaan di Bidang Analisis</b>
<b>SK</b>	<b>Penerimaan Pajak Negara yang Optimal</b>
<b>501</b>	<b>Kebijakan di Bidang Potensi dan Penerimaan</b>
<b>001</b>	<b>Kebijakan di Bidang Penggalan Potensi Perpajakan</b>
051	Analisis Dampak Kebijakan Perpajakan
052	Penyusunan Kebijakan Penggalan Potensi Perpajakan
053	Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Penggalan Potensi Perpajakan
054	Pelaksanaan Penunjang Kegiatan Direktorat PKP
<b>002</b>	<b>Kebijakan di Bidang Penerimaan Pajak</b>
051	Penyusunan Kebijakan Peningkatan Administrasi Penerimaan Pajak
052	Pemantauan dan Evaluasi Penerimaan Pajak
<b>502</b>	<b>Kebijakan di Bidang Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak</b>
<b>001</b>	<b>Tanpa Sub Output</b>
051	Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak
052	<i>Refinement Compliance Risk Management</i> (PU)
053	<i>Refinement</i> SIMDK Pusat dan Daerah (PU)
054	Penyusunan Kebijakan Arsitektur dan Proses Analisis Data Perpajakan (PU)
055	Joint Program DJP-DJBC (PU)
<b>1664</b>	<b>Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai</b>
<b>SK</b>	<b>Perumusan Kebijakan yang berkualitas</b>

**PAGU ALOKASI TA 2019**

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>
	<b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>
<b>501</b>	<b>Rancangan Peraturan di Bidang PPN dan PTLL</b>
<b>001</b>	<b>Rancangan Peraturan di Bidang PPN Perdagangan, Jasa, dan PTLL</b>
051	Perumusan Rancangan Peraturan PPN Perdagangan
052	Perumusan Rancangan Peraturan PPN Jasa dan PTLL
053	Pelaksanaan Diseminasi Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan PTLL
054	Penyusunan Kebijakan terkait Implementasi Cash Receipt System (PU)
<b>002</b>	<b>Rancangan Peraturan di Bidang PPN Industri</b>
051	Perumusan Rancangan Peraturan PPN Industri
052	Pelaksanaan Diseminasi Peraturan PPN Industri
<b>502</b>	<b>Rancangan Peraturan di Bidang PBB, BPHTB, KUP dan PPSP</b>
<b>001</b>	<b>Rancangan Peraturan di Bidang PBB dan BPHTB</b>
051	Perumusan Rancangan Peraturan di Bidang PBB dan BPHTB
052	Pelaksanaan Diseminasi Peraturan di Bidang PBB dan BPHTB
053	Pelaksanaan Penunjang Kegiatan Direktorat PP-I
<b>002</b>	<b>Rancangan Peraturan di Bidang KUP dan PPSP</b>
051	Perumusan Rancangan Peraturan di Bidang KUP dan PPSP
052	Pelaksanaan Diseminasi Peraturan di Bidang KUP dan PPSP
<b>1665</b>	<b>Perumusan Kebijakan di Bidang PPh</b>
<b>SK</b>	<b>Perumusan Kebijakan yang berkualitas</b>
<b>501</b>	<b>Rancangan Peraturan di bidang PPh</b>
<b>001</b>	<b>Tanpa Sub Output</b>
051	Perumusan Rancangan Peraturan PPh Badan
052	Perumusan Rancangan Peraturan PPh Pemotongan dan Pemungutan dan PPh Orang Pribadi
053	Pelaksanaan Diseminasi Peraturan PPh
<b>502</b>	<b>Layanan Batuan Hukum dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan</b>
<b>001</b>	<b>Layanan Pemberian Bantuan Hukum Pendampingan dan Penanganan Perkara di Luar Pengadilan Pajak</b>
051	Persiapan Dalam Rangka Pemberian Bantuan Hukum Pendampingan dan Penanganan Perkara di Luar Pengadilan
052	Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Pendampingan dan Penanganan Perkara di Luar Pengadilan Pajak
053	Pelaksanaan Evaluasi Pemberian Bantuan Hukum Pendampingan dan Penanganan Perkara di Luar Pengadilan
<b>002</b>	<b>Layanan Pengharmonisasian Peraturan Perpajakan</b>
051	Persiapan Pengharmonisasian Peraturan Perpajakan
052	Pelaksanaan Pengharmonisasian Peraturan Perpajakan
053	Pelaksanaan Penunjang Kegiatan Direktorat PP-II
<b>1666</b>	<b>Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi</b>
<b>SK</b>	<b>Sistem Manajemen Informasi yang Andal</b>
<b>501</b>	<b>Sistem Informasi di Bidang Perpajakan</b>
<b>001</b>	<b>Tanpa SubOutput</b>
051	Pengembangan Perangkat Keras Teknologi Informasi
052	Pengembangan Perangkat Lunak Teknologi Informasi
053	Koordinasi Pengembangan Teknologi Informasi
054	Pelaksanaan Penunjang Kegiatan Direktorat TTKI
<b>101</b>	<b>Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration System)</b>
<b>001</b>	<b>Tanpa Sub Output</b>
051	Finalisasi dan Negosiasi (Kontrak)
052	Pengembangan Core Tax System
<b>1667</b>	<b>Pembinaan Penyelenggaraan Perpajakan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Perpajakan di Daerah</b>
<b>501</b>	<b>Pelayanan dan Pengawasan Perpajakan</b>
<b>001</b>	<b>Pelayanan Perpajakan</b>
051	Pelaksanaan Penyuluhan dan Kehumasan
052	Pelaksanaan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan
053	Peningkatan Kualitas Pelayanan
<b>002</b>	<b>Pengawasan Perpajakan</b>
051	Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi, Pendataan dan Penilaian
052	Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak
053	Pelaksanaan Penagihan Piutang Pajak
054	Penyelesaian Keberatan

**PAGU ALOKASI TA 2019**

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>
<b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	
056	Dukungan Pengamanan Penerimaan
057	Laporan Hasil Intelijen Perpajakan dengan Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan
058	Pemeriksaan Bukti Permulaan
059	Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
060	Penyanderaan (Gijzeling)
<b>951</b>	<b>Layanan Internal (Overhead)</b>
<b>001</b>	<b>Tanpa Sub Output</b>
995	Pengadaan Kendaraan Bermotor
996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
998	Gedung dan Bangunan
<b>994</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>
<b>001</b>	<b>Tanpa Sub Output</b>
001	Gaji dan Tunjangan
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
<b>1668</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Perpajakan di Daerah</b>
<b>501</b>	<b>Pelayanan dan Pengawasan Perpajakan</b>
<b>001</b>	<b>Pelayanan Perpajakan</b>
051	Pelaksanaan Penyuluhan Perpajakan
052	Pelaksanaan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan
053	Peningkatan Kualitas Pelayanan
<b>002</b>	<b>Pengawasan Perpajakan</b>
051	Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi, Pendataan dan Penilaian
052	Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak
053	Pelaksanaan Penagihan Piutang Pajak
054	Dukungan Pengamanan Penerimaan
<b>951</b>	<b>Layanan Internal (Overhead)</b>
<b>001</b>	<b>Tanpa Sub Output</b>
995	Pengadaan Kendaraan Bermotor
996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
998	Gedung dan Bangunan
<b>994</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>
<b>001</b>	<b>Tanpa Sub Output</b>
001	Gaji dan Tunjangan
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
<b>1669</b>	<b>Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan</b>
<b>SK</b>	<b>Peningkatan Keandalan Data</b>
<b>501</b>	<b>Layanan Pengolahan Data Perpajakan</b>
<b>001</b>	<b>Tanpa Sub Output</b>
051	Pelayanan Pengolahan Data Perpajakan
052	Peningkatan Kualitas Pelayanan
<b>951</b>	<b>Layanan Internal (Overhead)</b>
<b>001</b>	<b>Tanpa Sub Output</b>
996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
998	Gedung dan Bangunan
<b>994</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>
<b>001</b>	<b>Tanpa Sub Output</b>
001	Gaji dan Tunjangan
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
<b>1670</b>	<b>Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJP</b>
<b>SK</b>	<b>SDM yang Kompetitif</b>
<b>950</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Eselon I</b>
<b>001</b>	<b>Layanan Organisasi dan Ketatalaksanaan</b>
051	Penataan Organisasi dan Tata Laksana

**PAGU ALOKASI TA 2019**

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>
	<b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>
052	Manajemen Kinerja Organisasi
053	Penyusunan Laporan Organisasi DJP
<b>002</b>	<b>Layanan Pengelolaan Keuangan</b>
051	Penyusunan RKA-K/L DIPA
052	Pelaksanaan Layanan Administrasi Pengelolaan Keuangan
053	Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan
054	Dukungan Layanan Perkantoran Satuan Kerja
<b>003</b>	<b>Layanan Administrasi Pengangkatan, Penempatan, dan Kepangkatan Kepegawaian</b>
053	Pelaksanaan Administrasi Pengangkatan, Penempatan, dan Kepangkatan Kepegawaian
<b>006</b>	<b>Layanan Perencanaan, Pengembangan, dan Pemberhentian Pegawai</b>
051	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian
052	Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>004</b>	<b>Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara</b>
051	Perencanaan Kebutuhan BMN
052	Pelaksanaan Layanan Pengelolaan BMN
053	Pemantauan dan Pelaporan BMN
<b>005</b>	<b>Layanan Umum</b>
051	Pelaksanaan ICV dan IHT
052	Kegiatan Penunjang Operasional Sekretariat
<b>951</b>	<b>Layanan Internal (Overhead)</b>
<b>001</b>	<b>Tanpa Sub Output</b>
995	Pengadaan Kendaraan Bermotor
996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
998	Gedung dan Bangunan
<b>994</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>
<b>001</b>	<b>Tanpa Sub Output</b>
001	Gaji dan Tunjangan
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
<b>5236</b>	<b>Pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi Umum Perpajakan dan Pengelolaan Pengaduan</b>
<b>SK</b>	<b>Pemenuhan Layanan Publik</b>
<b>501</b>	<b>Layanan Informasi dan Pengaduan Perpajakan</b>
<b>001</b>	<b>Tanpa Sub Output</b>
051	Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perpajakan
052	Peningkatan Kualitas Pelayanan
<b>951</b>	<b>Layanan Internal (Overhead)</b>
<b>001</b>	<b>Tanpa Sub Output</b>
900	Layanan Dukungan Internal
996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
<b>994</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>
<b>001</b>	<b>Tanpa Sub Output</b>
001	Gaji dan Tunjangan
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
<b>5879</b>	<b>Peningkatan Kegiatan Penyidikan</b>
<b>SK</b>	<b>Penyidikan yang Efektif</b>
<b>501</b>	<b>Dokumen di Bidang Penegakan Hukum</b>
<b>501</b>	<b>Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan</b>
051	Penyusunan Rencana Penyidikan dan Penyampaian SPDP
052	Pemeriksaan Saksi / Tersangka dan Penindakan
053	Penyerahan Berkas Perkara, Tersangka dan Barang Bukti
054	Persidangan
055	Evaluasi dan Monitoring Penyidikan
<b>U01</b>	<b>LPBP DENGAN TINDAK LANJUT PENYIDIKAN</b>
051	Persiapan Pemeriksaan Bukti Permulaan
052	Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan

**PAGU ALOKASI TA 2019**

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>
<b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	
053	Pengawasan Pemeriksaan Bukti Permulaan
054	Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Pelaporan
055	Evaluasi dan Monitoring Pemeriksaan Bukti Permulaan
<b>501</b>	<b>Dokumen di Bidang Penegakan Hukum</b>
<b>001</b>	<b>Dokumen di bidang Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan dan Forensik</b>
051	Persiapan Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan dan Forensik
052	Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan dan Forensik
053	Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan dan Forensik
054	Pelaksanaan Penunjang Kegiatan Direktorat Penegakan Hukum
055	Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
056	LPBP DENGAN TINDAK LANJUT PENYIDIKAN
<b>951</b>	<b>Layanan Internal (Overhead)</b>
<b>001</b>	<b>Tanpa Sub Output</b>
213	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
<b>5880</b>	<b>Perumusan Kebijakan dan Standardisasi Perpajakan Internasional</b>
<b>SK</b>	<b>Perumusan Kebijakan yang Berkualitas</b>
<b>501</b>	<b>Rancangan Peraturan di Bidang Perpajakan Internasional</b>
<b>001</b>	<b>Tanpa Sub Output</b>
051	Persiapan Bahan Penyusunan Rancangan Peraturan di Bidang Perpajakan Internasional
052	Pelaksanaan Perumusan Rancangan Peraturan di bidang Perpajakan Internasional
053	Pelaksanaan Kerja Sama Internasional di bidang Perpajakan
054	Pelaksanaan Diseminasi Peraturan di Bidang Perpajakan Internasional
055	Pelaksanaan Penunjang Kegiatan Direktorat Perpajakan Internasional
<b>502</b>	<b>Layanan di Bidang Pencegahan dan Penanganan Sengketa serta Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional</b>
<b>001</b>	<b>Layanan Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional</b>
051	Persiapan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional
052	Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional
053	Diseminasi Peraturan Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional
054	Monitoring Pelaksanaan Hasil Perundingan MAP/APA
<b>002</b>	<b>Layanan Pertukaran Informasi dan Bantuan Administratif terkait Perpajakan dengan negara/yurisdiksi mitra</b>
051	Persiapan Pelaksanaan Pertukaran Informasi dan Bantuan Administratif terkait Perpajakan dengan negara/yurisdiksi mitra
052	Pelaksanaan Pertukaran Informasi dan Bantuan Administratif terkait Perpajakan dengan negara/yurisdiksi mitra
053	Diseminasi Peraturan Pertukaran Informasi dan Bantuan Administratif terkait Perpajakan
054	Pelaksanaan Penilaian atas Kegiatan Pertukaran Informasi di Indonesia